

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001

Pengelolaan administrasi penyusunan peraturan perundangundangan di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Kemenko Polhukam Peraturan Menko Polhukam Nomor: Per-02/Menko/Polhukam/7/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di Kemenko Polhukam Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam 	PPU yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada 2. Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar 3. Memiliki inisiatif dan langkah antisipatif 4. Mampu menjaga penampilan 5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 6. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
Keterkaitan : 1. SOP Makro Dukungan Administrasi di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri	Peralatan/perlengkapan: 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Apabila pengelolaan administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi tidak sesuai SOP maka hasilnya kurang maksimal	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

Judul SOP Mikro

SOP Mikro Pengelolaan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri

	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
No.		Sesdep	Kabag TU dan Umum	Kasubbag Umum	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan kepada Kabag untuk memberikan dukungan/pelayanan teknis administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri sesuai dengan program kerja					Program kerja	5 Menit	Disposisi/arahan Sesdep	
2	Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan unit organisasi terkait (Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan) dan memberikan arahan teknis kepada Kasubbag Umum terkait pelaksanaan pemberian layanan dukungan teknis administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri sesuai dengan program kerja					Disposisi/arahan Sesdep	10 Menit	Disposisi/arahan teknis	
3	Pelaksanaan pemberian layanan dukungan teknis administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri			-	→	Disposisi/arahan teknis	60 Menit	Layanan teknis administrasi penyusunan PPU	
4	Menyusun konsep laporan pemberian layanan administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri untuk dilaporkan kepada Kabag Tata Usaha dan Umum		Т	→		Layanan teknis administrasi penyusunan PPU	120 Menit	Konsep laporan pemberian dukungan adminstrasi penyusunan PPU	
5	Memeriksa konsep laporan pemberian layanan administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Sesdep	Т	-			Konsep laporan pemberian dukungan adminstrasi penyusunan PPU	20 Menit	Konsep laporan laporan pemberian dukungan administrasi kehumasan yang telah diperiksa	
6	Memeriksa dan menandatangani laporan pemberian layanan administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri, dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis administrasi penyusunan PPU di lingkungan Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri	Y	Y			Konsep laporan laporan pemberian dukungan administrasi kehumasan yang telah diperiksa	10 Menit	Hasil laporan pemberian dukungan administrasi penyusunan PPU	